

Analisis Implementasi Enam Pilar *Smart City* Kota Depok Melalui Website *Smart City* Kota Depok Dan Aplikasi Depok *Single Window* (DSW)

Hasya Aulia¹, Manda Alifia², Muhammad Riza Albani³, Haura Nur Azizah⁴, Ivan Darmawan⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

hasya24001@mail.unpad.ac.id, manda24001@mail.unpad.ac.id, muhammad24294@mail.unpad.ac.id,

haura24003@mail.unpad.ac.id, ivan.darmawan@unpad.ac.id

Abstrak

Penerapan konsep *Smart City* menjadi strategi Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Smart City* Kota Depok melalui kesesuaian antara kebijakan daerah, ketersediaan layanan digital, dan keberfungsian platform resmi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan analisis dokumentasi terhadap *website* smartcity.depok.go.id dan aplikasi Depok *Single Window* (DSW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Smart City* di Kota Depok telah menghadirkan berbagai layanan digital pada enam pilar utama yang mendukung transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ditemukan kendala berupa perbedaan tingkat aksesibilitas, integrasi layanan yang belum optimal, serta pemanfaatan teknologi yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi sistem dan peningkatan literasi digital untuk mengoptimalkan implementasi *Smart City* secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Depok *Single Window*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *e-government*, pelayanan publik, *Smart City*, Kota Depok

PENDAHULUAN

Penerapan konsep *smart city* merupakan komitmen Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan daya saing daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Depok, yaitu “*Bersama Depok Maju*”, serta misi peningkatan transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital (*e-government*) yang menekankan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan secara normatif melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman *Electronic Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Depok dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Smart City*. Peraturan daerah tersebut menetapkan enam pilar utama, yaitu *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*, yang menjadi kerangka pembangunan kota dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan pelayanan publik dan pengelolaan perkotaan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, implementasi *Smart City* Kota Depok diwujudkan melalui pengembangan berbagai instrumen digital, terutama *website* resmi *Smart City* Kota Depok (smartcity.depok.go.id) dan aplikasi Depok *Single Window* sebagai platform layanan terpadu berbasis digital. Ketiga instrumen ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan keenam pilar *Smart City* yakni *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*. Mulai dari penyelenggaraan pemerintahan berbasis data, penyediaan layanan publik digital, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan ekonomi lokal, hingga pengelolaan lingkungan perkotaan.

Namun demikian, keberadaan kebijakan dan platform digital tidak serta-merta menjamin terwujudnya *smart city* secara optimal. Tingkat keterwujudan implementasi sangat ditentukan oleh

ketersediaan layanan, keberfungsian sistem, integrasi antarplatform, serta sejauh mana layanan tersebut benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian deskriptif untuk melihat bagaimana implementasi *Smart City* Kota Depok telah dijalankan secara nyata melalui layanan digital yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan menilai sejauh mana implementasi *Smart City* Kota Depok telah terwujud melalui layanan digital yang disediakan oleh pemerintah daerah pada masing-masing pilar *smart city*.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis implementasi *smart city* di Kota Depok, khususnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan layanan digital oleh pemerintah daerah. Pembahasan difokuskan pada konsep-konsep utama yang relevan dengan penelitian ini, meliputi implementasi, *smart city*, implementasi *smart city*, tata kelola pemerintahan, *e-government*, serta *e-government* dalam pelayanan publik. Penguraian konsep-konsep tersebut bertujuan untuk membangun kerangka berpikir yang sistematis dan analitis sebagai dasar dalam menilai keterwujudan implementasi *smart city* melalui berbagai instrumen digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Depok.

a. Implementasi

Secara bahasa, menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah).

b. Smart City

Smart city atau kota pintar merupakan suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan memanfaatkan dan mengimplementasikan kecanggihan sistem teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dalam sebuah wilayah (Utomo & Hariadi, 2016).

c. Implementasi Smart City

Implementasi *smart city* adalah proses penerapan kebijakan dan strategi *smart city* ke dalam bentuk program, sistem, dan layanan digital yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberhasilan implementasi *smart city* ditentukan oleh keterpaduan antara teknologi, organisasi pemerintahan, dan kebijakan publik yang mendukung (Nam & Pardo, 2011).

d. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan mekanisme pengelolaan pemerintahan yang melibatkan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya publik secara transparan, akuntabel, dan efektif. Tata kelola yang baik menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan (UNDP, 1997).

e. E-Government

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penerapan *e-government* tidak hanya sebatas digitalisasi layanan, tetapi juga mencerminkan transformasi sistem kerja pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Indrajit, 2002).

f. E-Government dalam Pelayanan Publik

E-government dalam pelayanan publik adalah penyelenggaraan layanan kepada masyarakat secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperluas akses layanan. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan tujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memahami objek penelitian secara nyata, tanpa memberikan perubahan kondisi yang sedang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi *Smart City* Kota Depok. Kemudian, dianalisis melalui kesesuaian antara konsep aplikasi dan kebijakan daerah ketersediaan serta keberfungsian layanan pada *website* smartcity.depok.go.id, dan implementasi layanan digital melalui aplikasi Depok *Single Window* pada masing-masing pilar *Smart City*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat optimalisasi implementasi *Smart City* Kota Depok serta mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan kebijakan, infrastruktur digital, dan praktik pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep *Smart City*. Analisis dokumentasi dilakukan dengan mengamati dan menelaah konten *website* smartcity.depok.go.id dan aplikasi Depok *Single Window*, mencakup fitur, fungsi, dan integrasi antar-pilar *Smart City*.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, membandingkannya dengan teori dan kerangka kebijakan *Smart City*, lalu mendeskripsikan hasilnya secara sistematis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan kondisi implementasi *Smart City* Kota Depok secara faktual dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Smart Governance

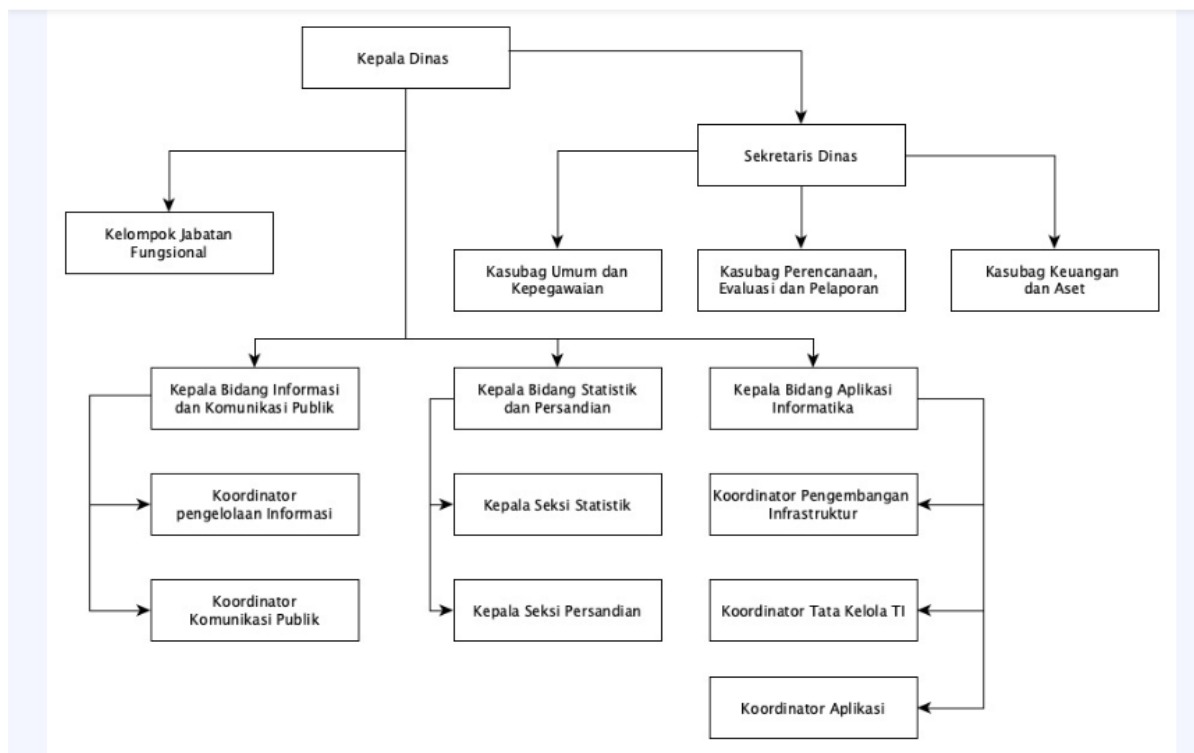
Smart Governance merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan *Smart City* dikarenakan menitikberatkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmen tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi bahwa tujuan *Smart Governance* adalah mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, serta efisiensi kebijakan publik. Pemerintah Kota Depok merumuskan setidaknya lima penerapan utama *Smart Governance*, yakni :

1. Menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik
2. Meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan
3. Melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan,
4. Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya, dan

5. Menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan.

Kelima penerapan ini menunjukkan bahwa *Smart Governance* juga difokuskan kepada penguatan kelembagaan, kolaborasi, dan kualitas pengambilan kebijakan.

Dalam konteks implementasi, salah satu indikator penting *Smart Governance* di Kota Depok ditandai dengan dibentuknya Portal Satu Data Depok sebagai wujud transparansi informasi publik dan integrasi data pemerintahan. Portal ini dibawah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, yang berperan sebagai *leading sector* dalam pengelolaan data dan integrasi sistem dengan struktur sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Diskominfo dalam mengelola Portal Satu Data Kota Depok

Keberadaan Portal Satu Data Depok bertujuan untuk menghimpun dan menyajikan data sektoral secara terbuka, akurat, dan terstandarisasi guna mendukung terwujudnya *Smart City*. Setidaknya, Portal Satu Data Depok telah mengunggah 198 data set yang dapat diakses oleh masyarakat melalui satudata.depok.go.id. Ketersediaan data ini memungkinkan publik untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan. Dengan demikian, Portal Satu Data berfungsi tidak hanya sebagai sarana transparansi, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kinerja pemerintah dalam menciptakan kebijakan maupun melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu, *Smart Governance* di Kota Depok juga diwujudkan melalui pengembangan aplikasi Depok *Single Window*. Aplikasi ini dirancang sebagai platform layanan terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat hanya melalui satu aplikasi berbasis *smartphone*. Dalam aplikasi tersebut, terdapat sejumlah layanan yang berkaitan langsung dengan *Smart Governance*, yakni fitur “Satu Data” yang menyediakan data dari Kelurahan yang ada di Kota Depok dan juga menyangkut Data ASN Kota Depok.

Smart Governance di Kota Depok telah menunjukkan upaya implementasi yang sistematis dan terintegrasi melalui digitalisasi layanan publik yang ada. Kehadiran Portal Satu Data Depok dan aplikasi Depok *Single Window* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Meski demikian, keberlanjutan *Smart Governance* tetap memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi yang masif serta konsistensi dalam menjaga kualitas dan keamanan data pemerintahan.

Smart Living

Dalam kerangka implementasi Depok *Smart City*, *Smart Living* diwujudkan melalui berbagai komponen layanan yang secara langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Pemerintah Kota Depok melalui portal resmi *Smart City*, salah satu perwujudan utama *Smart Living* ditunjukkan melalui pengembangan infrastruktur keamanan dan kenyamanan lingkungan, khususnya melalui program Depok *Smart Pole* (DSP) yang terintegrasi dengan sistem *Closed Circuit Television* (CCTV). Keberadaan DSP dan CCTV pada titik-titik strategis kota memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan kondisi lalu lintas dan keamanan publik secara real time, sehingga meningkatkan rasa aman masyarakat serta mendukung respons cepat terhadap potensi gangguan ketertiban dan keselamatan (Pemerintah Kota Depok, smartcity.depok.go.id).

Selain aspek keamanan, *Smart Living* di Kota Depok juga menempatkan layanan kesehatan digital sebagai komponen strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan informasi yang disampaikan pada platform Depok *Smart City*, pemerintah daerah menyediakan berbagai instrumen digital seperti Kalkulator Anemia dan Kalkulator Stunting yang berfungsi sebagai sarana deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Layanan ini diperkuat dengan keberadaan RSUD Khidmat Sehat Afiat (KISA), RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA), serta integrasi layanan Puskesmas dan skema *Universal Health Coverage* (UHC). Menurut laporan resmi pemerintah daerah, digitalisasi sektor kesehatan ini bertujuan untuk memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendorong pemerataan kualitas kesehatan masyarakat Kota Depok.

Lebih lanjut, dimensi *Smart Living* juga tercermin dalam pengembangan sistem pengaduan publik berbasis digital sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan perkotaan. Pemerintah Kota Depok, sebagaimana tercantum dalam laman *Smart City* dan kanal informasi daerah, menyediakan berbagai platform pengaduan seperti SP4N-LAPOR!, Pengaduan Parkir, Laporan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta Laporan SIPPA. Keberadaan kanal-kanal ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan laporan secara langsung kepada pemerintah, sekaligus mendorong peningkatan responsivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, *Smart Living* tidak hanya berorientasi pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada penguatan interaksi antara pemerintah dan warga.

Dalam sektor perhubungan, *Smart Living* di Kota Depok diwujudkan melalui layanan digital yang mendukung keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Depok yang dipublikasikan melalui kanal *Smart City*, layanan seperti Permohonan Derek, Input Rampcheck, dan Tracking Rampcheck dikembangkan untuk mempermudah pengawasan kelayakan kendaraan serta penanganan gangguan lalu lintas. Digitalisasi layanan perhubungan ini menunjukkan bahwa *Smart Living* diarahkan tidak hanya pada aspek kenyamanan, tetapi juga pada peningkatan keselamatan transportasi dan efisiensi mobilitas perkotaan.

Sebagai prasyarat keberhasilan seluruh layanan digital tersebut, Pemerintah Kota Depok juga menyediakan akses WiFi publik di berbagai ruang kota. Menurut informasi resmi pemerintah daerah, penyediaan konektivitas internet gratis dimaksudkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan digital serta mengurangi kesenjangan digital antarwilayah dan kelompok sosial. Dengan

tersedianya akses internet yang lebih merata, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan berbagai layanan *Smart Living* secara optimal.

Smart Society

Smart Society di Kota Depok merujuk pada masyarakat cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan (smartcity.depok.go.id). Dalam mewujudkan *Smart Society*, Kota Depok memiliki beberapa layanan untuk memudahkan masyarakat. Namun, melihat dari *website* resmi *Smart City* Kota Depok, layanan yang tersedia tidak dapat diakses khususnya pada *Smart Society* seperti layanan perpustakaan, kartu kuning, lowongan pekerjaan. Informasi-informasi yang tersedia juga tidak dapat diakses seperti informasi kependudukan, zakat, dan pendidikan. Layanan *Smart City* Kota Depok kini dapat diakses melalui aplikasi Depok *Single Window*. Layanan pada aspek *Smart Society* di aplikasi DSW ini di antaranya adalah pendidikan, kependudukan, dan sosial.

Layanan pendidikan yang tersedia pada aplikasi DSW adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Layanan ini berisikan beberapa fitur yaitu, panduan langkah pendaftaran SPMB dari awal hingga akhir. Lalu fitur jadwal SPMB yang berisikan informasi lengkap mengenai tanggal dan waktu setiap tahapan SPMB agar tidak terlewatkan. Statistik sekolah yang berisikan data pendaftaran dan persaingan secara *real-time* juga dapat diakses pada aplikasi ini sehingga sangat memudahkan untuk melihat kondisi dan peluang ketika memilih sekolah. Terakhir adalah fitur cek status SPMB untuk memantau status pendaftaran dan hasil seleksi SPMB secara langsung. Layanan pendidikan yang tidak dapat diakses pada *website Smart City* Depok dapat diakses melalui aplikasi Depok *Single Window* ini.



Gambar 2. Fitur SPMB pada Aplikasi Depok *Single Window*

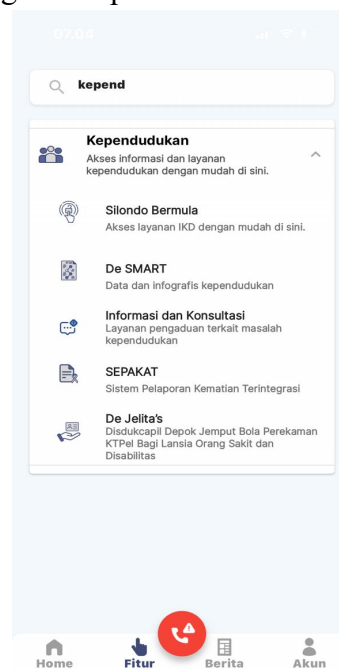
Selain pendidikan, layanan kependudukan juga dapat diakses pada aplikasi DSW. Terdapat lima layanan dengan manfaat yang berbeda-beda. Layanan pertama adalah layanan Silondo Bermula yaitu, layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD). Akses IKD dapat dilakukan melalui dinas maupun kecamatan. Pendaftaran pelayanan dapat dilakukan melalui aplikasi. Pilihan pelayanannya pun bermacam-macam contohnya seperti cetak Kartu Identitas Anak (KIA), pendaftaran identitas kependudukan digital, urusan perpindahan, dan lainnya.

Layanan yang kedua adalah De'SMART yaitu layanan untuk mengakses data kependudukan di Kota Depok. Data yang tersedia dipisahkan pertahun dan semesternya, sehingga masyarakat dapat mengakses data setiap tahunnya. Isi dari data kependudukan bersih (DKB) ini sangat lengkap dimulai dari pilihan kecamatan dan kelurahan, lalu data-data seperti jumlah wajib KTP, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, kelompok umur penduduk, dan lainnya.

Lalu yang ketiga adalah layanan Informasi dan Konsultasi untuk pengaduan terkait masalah kependudukan. Pada layanan ini nantinya pengguna akan diarahkan langsung ke kontak whatsapp Dukcapil Depok otomatis dengan *keyword* “konsultasi layanan” dan dapat langsung mengirimkan pesan pengaduannya.

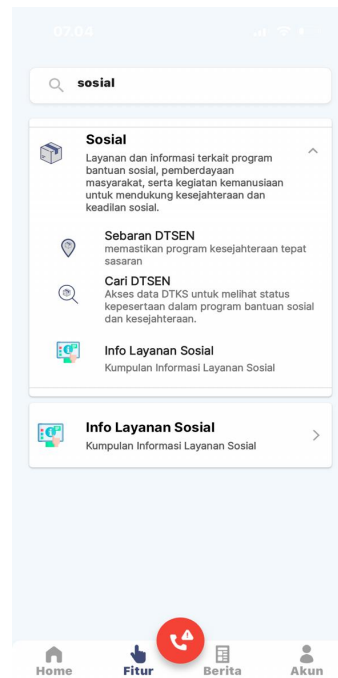
Selanjutnya adalah layanan SEPAKAT yaitu Sistem Pelaporan Kematian Integrasi Penerbitan Akta Kematian. SEPAKAT ini merupakan layanan sistem pelaporan kematian yang terintegrasi dengan penerbitan akta kematian. Layanan ini secara lengkap mencantumkan persyaratan yang diperlukan, serta dokumen yang dihasilkan seperti Surat Keterangan Kematian, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan KTPel Pasangan (jika yang mati berstatus kawin). Pengguna dapat dengan mudah mendaftar dengan langkah-langkah yang lengkap.

Layanan kelima dari layanan kependudukan *Smart Society* Depok adalah De Jelita's atau layanan pendaftaran perekaman data KTPel baru jemput bola bagi penduduk lansia, orang sakit, dan disabilitas. Pendaftaran dapat dilakukan untuk perorangan maupun komunitas.



Gambar 3. Fitur Layanan Kependudukan pada Aplikasi Depok *Single Window*

Lalu terdapat layanan sosial yang berisikan informasi terkait program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemanusiaan untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial. Terdapat dua fitur pada layanan ini yaitu sebaran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program kesejahteraan tepat sasaran. Pencarian sebaran ini dilakukan berdasarkan wilayah kecamatan dan kelurahan. Kategorinya juga dapat dipilih *By Name By Adress* (BNBA) atau penerima bansos. Dan terdapat fitur cari DTSEN untuk melihat status kepesertaan dalam program bantuan sosial dan kesejahteraan.

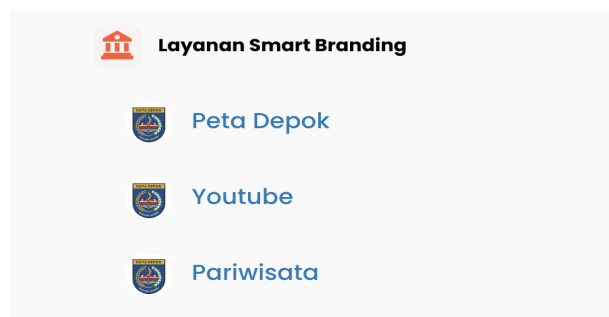


Gambar 4. Fitur Layanan Sosial pada Aplikasi Depok *Single Window*

Aplikasi Depok *Single Window* (DSW) telah menyediakan layanan *Smart Society* yang relatif lengkap dan fungsional. Seluruh fitur utama pada aspek pendidikan, kependudukan, dan sosial dapat diakses dengan baik serta berjalan sesuai dengan tujuan layanan publik digital, mulai dari penyediaan informasi, proses pendaftaran, pemantauan status layanan, hingga akses data dan pengaduan masyarakat.

Smart Branding

Smart Branding merupakan salah satu dimensi *smart city* yang berfokus pada pembangunan citra kota melalui pengelolaan potensi daerah seperti pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Menurut kajian literatur terbaru (ResearchGate, 2023), *smart branding* adalah proses strategis untuk membangun dan mengelola identitas kota secara unik agar lebih menarik bagi wisatawan, investor, dan masyarakat, sekaligus memperkuat keterikatan warga terhadap ciri khas kotanya. Pendekatan ini tidak hanya sebatas pencitraan visual, tetapi juga mencakup pengalaman, narasi, dan karakteristik kota yang ingin dibangun secara berkelanjutan.



Gambar 5. Fitur Layanan *Smart Branding* pada Website Resmi *Smart City* Depok

Kota Depok mengadopsi konsep ini dalam program *Depok Smart City*, yang mendefinisikan *smart branding* sebagai “Upaya mengemas sumber daya dan program-program dari semua dimensi menjadi branding Kota Depok.” Tujuannya mencakup pembangunan daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, serta penataan wajah daerah.

Dengan kata lain, *smart branding* di Depok bertujuan menciptakan identitas kota melalui arsitektur unggulan, pengembangan pusat kota, peningkatan kompetensi SDM kreatif, iklim bisnis kondusif, penguatan sektor pariwisata, dan promosi berkelanjutan melalui media digital dan kerja sama media. Penerapan kebijakan ini mencakup langkah-langkah berikut:

1. Menciptakan identitas wajah daerah yang menonjolkan nilai arsitektur khas, mengikuti dinamika modernisasi, dan menampilkan tata ruang kota yang indah, bersih, serta membanggakan.
2. Mengembangkan etalase kota di pusat dan sub-pusat kota sebagai simbol identitas daerah.
3. Membangun identitas SDM yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan peduli lingkungan.
4. Menciptakan iklim bisnis kondusif untuk mendorong investasi daerah, perdagangan, dan industri kreatif.
5. Mengembangkan potensi wisata lokal dengan menonjolkan budaya, kenyamanan lingkungan, dan keramahtamahan warga.
6. Menyelenggarakan promosi berkelanjutan melalui internet dan media sosial.
7. Memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dengan media cetak dan elektronik.

Penerapan *smart branding* di Kota Depok tampak dari berbagai kegiatan berkelanjutan. Pemerintah memanfaatkan media digital sebagai sarana utama promosi melalui situs resmi, media sosial, dan kanal informasi daring. Kegiatan pariwisata dan budaya seperti *city tour*, festival, dan acara publik rutin diadakan untuk memperkenalkan potensi lokal sekaligus memperkuat identitas kota.

Di sektor ekonomi kreatif, *smart branding* diwujudkan melalui dukungan terhadap UMKM dan industri kreatif. Pemerintah Kota Depok aktif menyelenggarakan pameran dan *expo* produk lokal dari berbagai kecamatan. Kegiatan ini memperluas ruang promosi bagi pelaku usaha sekaligus membangun citra Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif. Berdasarkan data dari LP2M UPN Veteran Jakarta (2023), terdapat lebih dari 150 *startup* dan pelaku industri kreatif di Depok yang berperan dalam memperkuat ekosistem *media arts*.

Pemerintah juga memberikan pelatihan pemasaran digital dan pendampingan usaha untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM serta komunitas pariwisata lokal. Strategi ini menjadi bagian penting dari *smart branding* era digital yang menekankan inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Dampak penerapan *smart branding* mulai terlihat dari peningkatan pengakuan terhadap Kota Depok di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2023, Depok resmi terpilih menjadi anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO (*UNESCO Creative Cities Network*) dalam kategori *Media Arts*. Pengakuan ini menandakan bahwa Depok dinilai memiliki ekosistem kreatif yang berkembang serta kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan budaya lokal.

Namun, penerapan *smart branding* juga menghadapi beberapa tantangan. Penelitian oleh Universitas Brawijaya (2022) menunjukkan bahwa implementasi *smart city* di Depok masih terkendala koordinasi lintas dinas, kesadaran masyarakat yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur digital. Selain itu, partisipasi warga dalam kegiatan promosi dan pengembangan pariwisata masih perlu ditingkatkan agar branding kota tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi gerakan bersama masyarakat.

Secara keseluruhan, *smart branding* dalam program *Depok Smart City* tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga strategi pembangunan jangka panjang. Melalui pendekatan ini, Kota Depok berupaya menampilkan identitasnya sebagai kota yang kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Keberhasilan branding tidak hanya diukur dari pengakuan internasional, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat ikut merasa memiliki dan berperan aktif dalam menjaga citra kotanya.

Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, Depok berpotensi menjadi kota yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

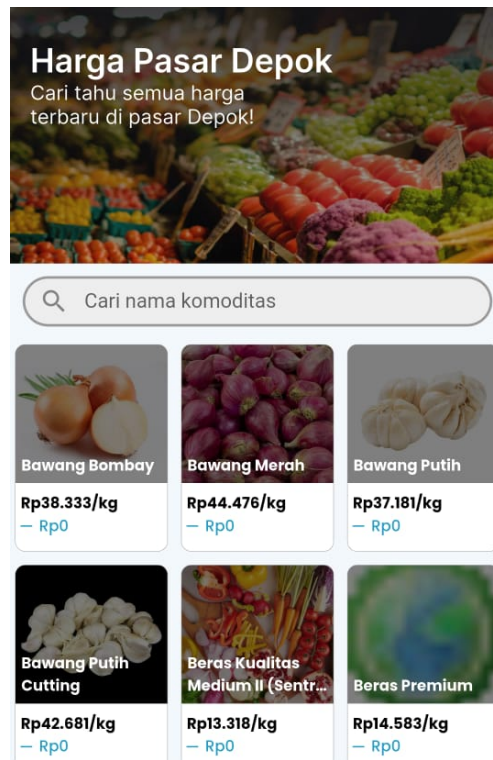
Smart Economy

Pilar lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan *Smart City* di Kota Depok adalah *Smart Economy*. *Smart Economy* memiliki tujuan utama untuk meningkatkan penataan dan penguatan sektor industri primer, sekunder, dan tersier guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Depok merumuskan 5 (lima) bentuk penerapan *Smart Economy* yakni,

1. Membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru antara lain dengan menyusun rencana induk industri kreatif,
2. Meningkatkan inovasi, akses, daya saing, dan jejaring koperasi dan usaha mikro,
3. Memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah Kota,
4. Mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di wilayah Daerah Kota, dan
5. Menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi.

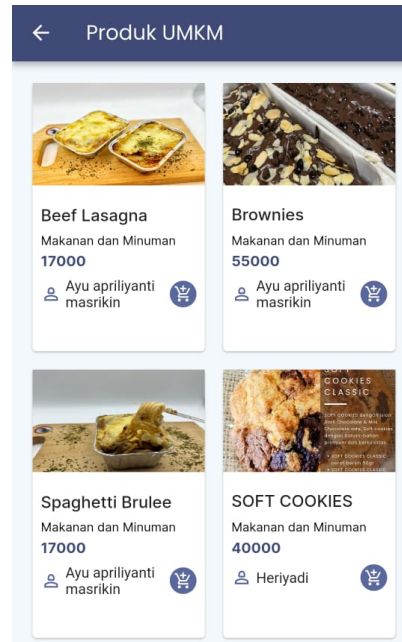
Kelima penerapan ini diarahkan untuk menggali potensi lokal, meningkatkan kepedulian terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang tulang punggung perekonomian lokal, memperluas jangkauan pasar, mendorong pemerataan manfaat ekonomi dan melakukan transaksi secara lebih transparan dan efisien.

Implementasi *Smart Economy* di Kota Depok dapat diakses melalui aplikasi Depok *Single Window*, yang berfungsi sebagai platform terpadu untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dan informasi hanya melalui satu aplikasi pada *smartphone*. Dalam kategori layanan ekonomi pada Depok *Single Window*, masyarakat dapat mengakses kategori layanan “Harga Komoditas Pasar” yang menyajikan informasi harga terbaru berbagai kebutuhan pokok di Kota Depok. Informasi ini diperlukan agar dapat menciptakan transparansi harga, melindungi konsumen, dan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.



Gambar 6. Fitur Harga Komoditas Pasar pada Aplikasi Depok *Single Window*

Lalu pada fitur UMKM, aplikasi ini memuat informasi mengenai “Produk UMKM” yang berfungsi sebagai sarana promosi sekaligus perluasan akses pasar bagi pelaku usaha. Hal ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan adaptasi pelaku usaha terhadap perkembangan ekonomi digital.



Gambar 7. Fitur Produk UMKM pada Aplikasi Depok *Single Window*

Tidak hanya itu, Depok *Single Window* juga menyediakan fitur Pajak, khususnya layanan “Cek Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).” Layanan ini mencerminkan hubungan antara Smart Economy dan tata kelola keuangan daerah untuk dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Smart Economy di Kota Depok menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan akuntabel yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui penguatan ekonomi kreatif, UMKM, digitalisasi pasar dan layanan pajak, *Smart Economy* diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan *Smart Economy* tetap memerlukan dukungan peningkatan kapasitas pelaku usaha untuk dapat lebih memanfaatkan fitur-fitur yang ada dan juga konsistensi kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh.

Smart Environment

Smart Environment atau lingkungan hidup yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan di Kota Depok. Selain itu, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat, nyaman, serta memberikan wadah untuk masyarakat dapat berkontribusi secara langsung. Penerapan lingkungan hidup yang cerdas (*Smart Environment*) antara lain :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih,
2. Meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan,
3. Melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan,
4. Mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan,
5. Menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman,
6. Revitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat, dan
7. Mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan.

Kota Depok menjadi salah satu daerah di Indonesia yang aktif mengembangkan konsep *Smart City*, khususnya dalam dimensi *Smart Environment*. Fokus utama pengembangan ini adalah peningkatan pengelolaan lingkungan dengan bantuan teknologi, perluasan ruang hijau, dan pengurangan timbulan sampah. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menetapkan sejumlah program strategis seperti *Zero Waste City*, pengembangan kebun raya, serta pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP) bekerja sama dengan PLN. Upaya tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 yang menekankan penggunaan teknologi untuk menjaga kualitas lingkungan dan menekan emisi karbon.

Dalam lima tahun terakhir, pengelolaan sampah menjadi isu utama *Smart Environment* Depok. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), volume sampah di Depok mencapai 1.265 ton per hari pada 2023 dan meningkat menjadi 1.363 ton per hari pada 2024. Untuk menekan angka ini, pemerintah memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan pengelolaan sampah. Melalui aplikasi Depok *Single Window* (DSW), SIGAP Depok, dan SP4N-LAPOR, warga dapat melaporkan permasalahan sampah secara langsung agar segera ditangani petugas lapangan. Pemerintah juga mengembangkan dashboard Smart Environment yang memuat data real-time tentang volume sampah, ruang terbuka hijau, serta kualitas udara. *Program Plastic Smart Cities* hasil kerja sama dengan WWF Indonesia turut mendukung pengelolaan limbah plastik melalui jaringan bank sampah seperti Bank Sampah Induk Rumah Harum di Sukmajaya.

Inovasi lain yang dikembangkan adalah penggunaan incinerator ramah lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Merdeka yang mampu mengolah hingga 20 ton sampah per hari dan sudah memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DLHK juga memanfaatkan sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan dan menambah ruang terbuka hijau di seluruh wilayah Depok. Pemerintah memasang Smart Pole atau tiang lampu cerdas di sejumlah titik yang dilengkapi sensor kualitas udara, CCTV, dan WiFi publik, sehingga dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung.



Gambar 8. Fitur CCTV dan *Connect Wifi* pada Aplikasi Depok *Single Window*

Kualitas udara dan air di Kota Depok dipantau menggunakan alat resmi milik Kementerian LHK. Data indeks standar pencemar udara (ISPU) menunjukkan kualitas udara Depok berada pada kategori sedang dan masih aman bagi kesehatan. Pemantauan kualitas air juga dilakukan di beberapa titik sungai, termasuk Sungai Ciliwung. Selain itu, pemerintah menutup sejumlah tempat pembuangan sampah liar dan mengalihkan pengelolaan ke bank sampah serta unit pengolahan resmi agar kebersihan kota tetap terjaga.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan *Smart Environment*. Pemerintah menyediakan kanal digital untuk menampung aspirasi dan pelaporan warga, serta melibatkan komunitas lokal dalam program Kampung Iklim (Proklam) dan Gerakan Bersih dan Edukasi Lingkungan (GEBER). Setiap kelurahan di Depok juga mengembangkan Kampung Caraka sebagai bagian dari Proklam dengan dukungan anggaran pemerintah. Melalui kampanye Depok Bebas Plastik dan program ekonomi sirkular, masyarakat diajak aktif memilah sampah, menanam pohon, serta mengelola lingkungan secara mandiri.

Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa Kota Depok telah mengarah pada pembangunan lingkungan cerdas yang berbasis teknologi dan partisipasi publik. Kombinasi kebijakan pemerintah, inovasi digital, dan keterlibatan masyarakat menjadi landasan utama Depok dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas lingkungan perkotaan di era *smart city*.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, Pemerintah Kota Depok telah menunjukkan komitmen terutama untuk mewujudkan *Smart City* dengan mewujudkan transformasi tata kelola dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa platform *website* maupun aplikasi telah dibuat oleh Pemerintah Kota Depok yakni *website* resmi *Smart City* Kota Depok dan aplikasi Depok *Single Window*. Setidaknya Kota Depok berkomitmen untuk dapat melaksanakan 6 (enam) pilar *Smart City* yakni, *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*.

Dalam pilar *Smart Governance* dapat dilihat melalui Portal Satu Data Depok dan aplikasi Depok *Single Window* melalui fitur Satu Data dan Data ASN yang dimana meningkatkan transparansi, akuntabilitas data, dan memudahkan masyarakat mencari data yang dibutuhkan. Selanjutnya, pilar *Smart Living* diwujudkan melalui penyediaan layanan keamanan seperti Depok *Smart Pole* (DSP), layanan kesehatan seperti Kalkulator Anemia, Kalkulator Stunting, RSUD Khidmat Sehat Afiat (KISA), dan RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) dan juga layanan perhubungan, pengaduan publik seperti SP4N-LAPOR!, Pengaduan Parkir, Laporan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan Laporan SIPPA. Layanan tersebut diupayakan untuk dapat melakukan peningkatan kualitas hidup dan mewujudkan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, *Smart Society* melalui layanan pendidikan seperti pendaftaran SPMB, layanan kependudukan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan De'SMART, dan layanan sosial seperti layanan SEPAKAT.

Pilar *Smart Branding* berupaya untuk membangun citra Kota Depok sebagai kota kreatif dan berdaya saing. Salah satu apresiasi yakni pengakuan sebagai bagian dari UNESCO *Creative Cities Network* dalam kategori *Media Arts*. Lalu adapula, *Smart Economy* terwujud melalui digitalisasi layanan ekonomi, promosi UMKM, transparansi harga komoditas, dan kemudahan layanan perpajakan. Pilar *Smart*

Environment menunjukkan upaya serius dalam kepedulian terhadap lingkungan agar dapat berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan sampah berbasis data, pemantauan kualitas lingkungan, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Akan tetapi, implementasi *Smart City* di Kota Depok ini masih menghadapi beberapa tantangan. Baik itu integrasi layanan antar platform yang belum optimal, perbedaan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan digital, serta kebutuhan peningkatan literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia. Diperlukannya peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, optimalisasi sistem, dan peningkatan partisipasi melalui himbauan kepada masyarakat. Dengan begitu, implementasi *Smart City* di Kota Depok dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Arista, A., Ermatita, E., & Wadu, R. M. (2023). *An integrated Depok Smart City evaluation*. International Journal on Informatics Visualization (JOIV).
- Antara News. (2021, 14 Desember). *Pemkot Depok raih penghargaan Smart City kategori Smart Living*. Antara News.
- BeritaDepok.id. (2024, Juni 5). *DLHK gelar Gerakan Bersih dan Edukasi Lingkungan (GEBER) pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024*. BeritaDepok.id.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. *Pengertian Implementasi*. (n.d.). https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf
- Bappeda Kota Depok. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026*. Pemerintah Kota Depok.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. (2024). *Pemanfaatan aplikasi DSW dan SIGAP untuk pengaduan layanan lingkungan*. Diskominfo Kota Depok.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. (2023). *Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2023*. Pemerintah Kota Depok.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. (2024). *Data Pemantauan Kualitas Udara Kota Depok Tahun 2024*. Pemerintah Kota Depok.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. (2024, Februari 21). *Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional: DLHK Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah*. BeritaDepok.id.
- Diskominfo Depok. (2024). *Portal Statistik Kota Depok*. Depok.go.id. <https://satudata.depok.go.id/>
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi.
- Izzuddin, F. N. (2022). KONSEP SMART CITY DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 376–382. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.96>
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Wadsworth.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City*. Kementerian Kominfo RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Gerakan menuju 100 smart city*. Kementerian Kominfo RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Tahun 2023*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/implementasi>
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.

- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). *Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions*. Digital Government Research Conference.
- Pemerintah Kota Depok. (2017). *Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Electronic Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok*. Bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96948/perwali-kota-depok-no-46-tahun-2017>
- Pemerintah Kota Depok. (2019). *Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas*. Bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135302/perda-kota-depok-no-2-tahun-2019>
- Pemerintah Kota Depok. (2019). *Masterplan Smart City Kota Depok*. Pemerintah Kota Depok.
- Pemerintah Kota Depok. (2020). *Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Electronic Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok*. Pemerintah Kota Depok.
- Pemerintah Kota Depok. (2020). *Roadmap Depok Smart City*. Pemerintah Kota Depok.
- Pemerintah Kota Depok. (2023). *Depok terpilih sebagai jejaring Kota Kreatif UNESCO kategori media arts*. Pemerintah Kota Depok.
- Pemerintah Kota Depok. (2020). *Portal Resmi Kota Depok*. Depok.go.id. <https://www.depok.go.id/layanan>
- Pemerintah Kota Depok. (2022a). *Depok Smartcity*. Depok Smartcity. <https://smartcity.depok.go.id/>
- Pemerintah Kota Depok. (2022b). *Smart Society Kota Depok*. Depok.go.id. <https://smartcity.depok.go.id/layanan/smart+society>
- Smart City Kota Depok. (2023). *Smart branding Kota Depok*. Smart City Kota Depok.
- Sugiarsono, J. (2018). *City branding: Konsep dan strategi pengembangan kota*. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 85–98.
- Syarif, M. (2021, 15 Desember). *Pemkot Depok raih penghargaan Smart City — Kategori Smart Living*. Neraca.
- UNESCO Creative Cities Network. (2023). *Depok designated as a creative city of media arts*. UNESCO Creative Cities Network.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.
- Widodo, T., & Nugroho, R. (2020). *Smart city dan pembangunan daerah*. Rajawali Pers.